



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR **85** TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

### BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

### Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Rencana Kerja Badan Daerah;
- f. Rencana Kerja Dinas Daerah;
- g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
- h. Rencana Kerja Kecamatan.

(2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
  - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
  - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
  - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
  - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
  - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (4) Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;
  - b. Rencana Kerja Kecamatan Sanden;
  - c. Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;
  - d. Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;
  - e. Rencana Kerja Kecamatan Pandak;
  - f. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;
  - g. Rencana Kerja Kecamatan Bantul;
  - h. Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;
  - i. Rencana Kerja Kecamatan Kretek;
  - j. Rencana Kerja Kecamatan Pundong;
  - k. Rencana Kerja Kecamatan Sewon;
  - l. Rencana Kerja Kecamatan Jetis;
  - m. Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;
  - n. Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;
  - o. Rencana Kerja Kecamatan Pleret;
  - p. Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan; dan
  - q. Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.

#### Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 27 juli 2018

BUPATI BANTUL, 

  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 27 juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun Dokumen Renja 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

#### **1.1.1. Pengertian Renja**

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan sesuai Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

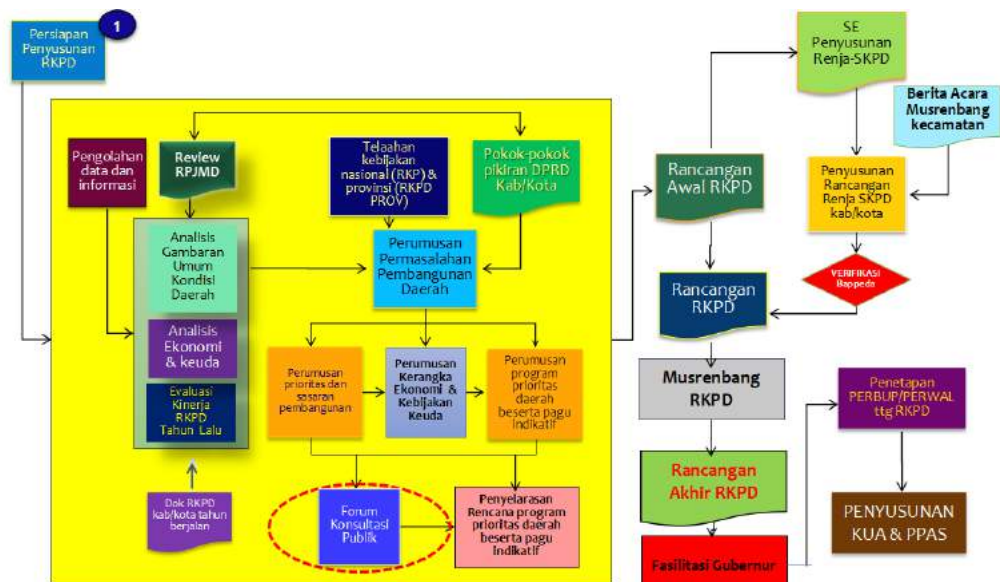
#### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja**

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.



## Prinsip Penyusunan:

- Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
- Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
- Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
- Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Adapun tahapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
  - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja

Perangkat Daerah; dan

- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup:

- Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- Pendahuluan;
- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- Penutup.

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

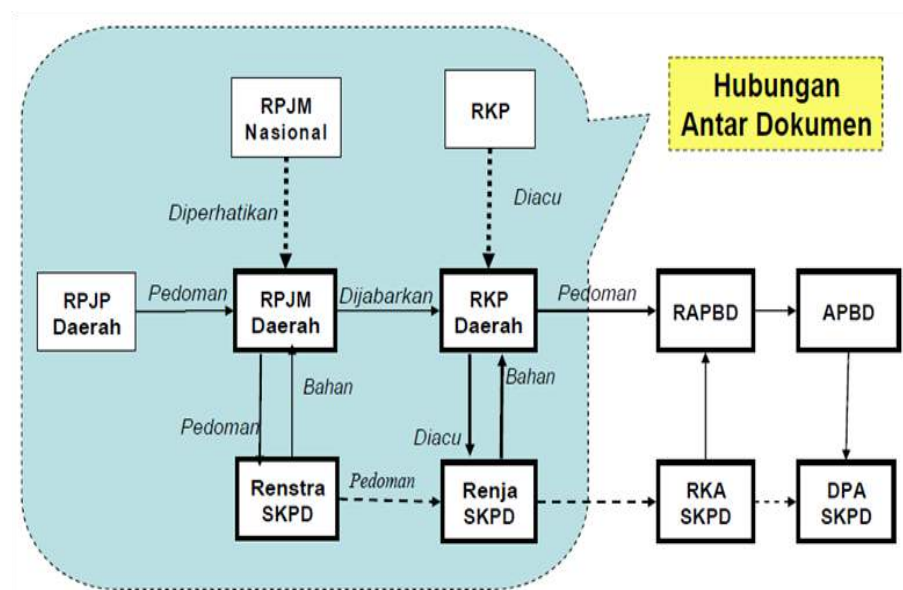
dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

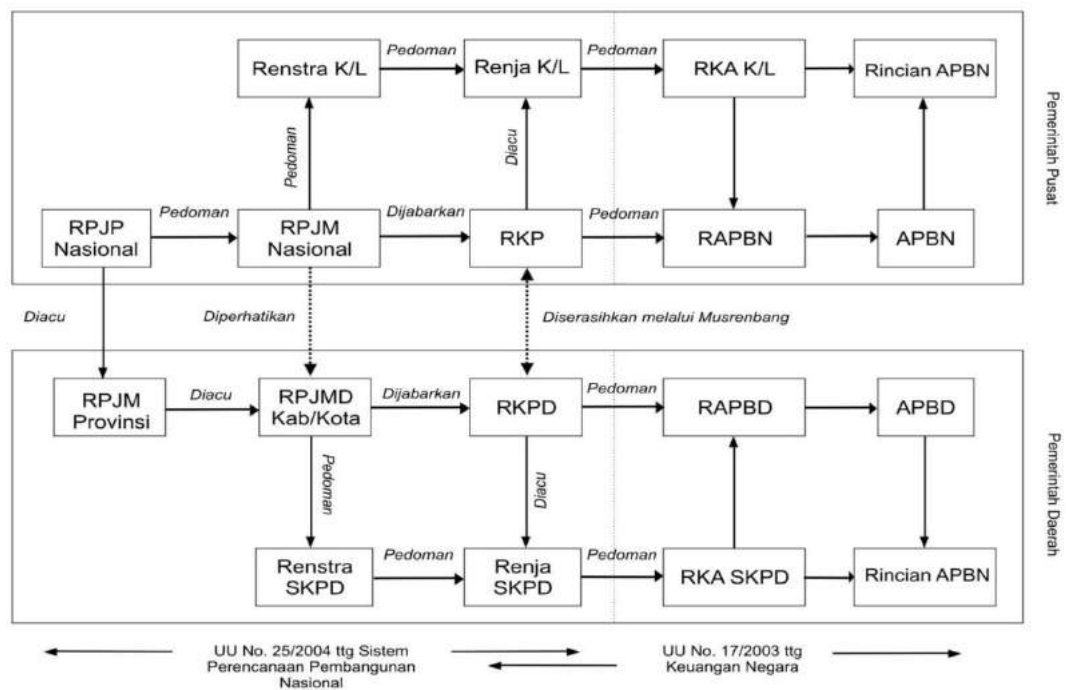
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

### 1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3  
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Kementerian Perdagangan Nomor (kementrian belum mengundang) Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019;
- e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
- g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

#### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA 2017**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2017) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
3. Program Pemberdayaan Pedagang
4. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

**b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

**c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:**

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.06.3.06.01.01.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	orang barang	312	509,500,000	312	509,500,000.00	100	100
		Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	25		25	-	100	
		Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	jenis	15		15	-	100	
		Jumlah Perangko, Materai Dan Benda Pos lainnya	lembar	1700		1,700	-	100	
		Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	jenis	30		30	-	100	
		Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	bulan	12		12	-	100	
		Jumlah Surat Kabar/Majalah	eksemplar	1080		1,080	-	100	
		Jumlah Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi Listrik dan Instalasi Air	lokasi	1		1	-	100	
		Jumlah Jenis Barang Cetak	jenis	26		26	-	100	
		Jumlah Penggandaan	lembar	110840		110,840	-	100	
		Jumlah Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	oh	13000		13,000	-	100	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	unit			-	-		
		Jumlah Pengadaan Pompa	unit			-	-		



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jumlah Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	unit			-	-		
		Jumlah Tambah Daya Listrik	lokasi	3		3	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat	orang	969	981,360,100	969	981,360,100	100	100
		Jumlah Peserta Kegiatan	orang	3247		3,247	-	100	
		Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	1337		1,337	-	100	
		Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	200		200	-	100	
		Jumlah Peserta Sosialisasi Terkait Perdagangan	orang	150		150	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Pembayaran Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS	ob	2520	4,898,855,612	2,520	4,898,855,612	100	100
		Pembayaran Sewa Tanah/Lahan untuk Pasar	pasar/tahun	12		12	-	100	
		Jumlah Pembayaran Asuransi Kesehatan Bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS	ob	2520		2,520	-	100	
<b>3.06 . 3.06.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	%	<b>98</b>	<b>994,150,000</b>	<b>98</b>	<b>994,150,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.06 . 3.06.01 . 02 . 50	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor	unit	2	57,875,000	2	57,875,000	100	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	unit						
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah penyediaan perlengkapan kantor gerobak sampah, pompa air, rak arsip, AC, kulkas, kipas angin, dispenser, speaker, soundsystem)	unit	95	321,650,000	95	321,650,000	100	100
		Jumlah penyediaan peralatan kantor (komputer dan kelengkapannya, laptop, printer, handycam, kamera, GPS, CCTV)	unit	23		23	-	100	
		jumlah penyediaan display barang	unit	1		1		100	
		Jumlah Pengadaan Meja Kerja Pejabat	unit			-	-		
		Jumlah Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	unit			-	-		
		Jumlah Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	paket			-	-		
		Jumlah Pengadaan Sound System	unit			-	-		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Bahan Baku Bangunan untuk pemeliharaan gedung	unit		257,875,000	-	257,875,000	100	
		Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	unit	1		1		100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jumlah Ruang Rapat/Ruang Kerja Yang Direhab	paket	1		1	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	unit	38	311,750,000	38	311,750,000	100	100
		Jumlah Penggantian Suku Cadang	unit	21547		21,547	-	100	
		Tersedianya BBM Operasional	liter			-	-		
		Belanja Jasa KIR	kali	2		2	-	100	
		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	buah	28		28	-	100	
		Belanja Pengisian Freon	kali	8		8		100	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengisian freon	unit		45,000,000	-	45,000,000		100
		Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	unit	45		45		100	
<b>3.06 . 3.06.01 . 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan kapastitas sumberdaya aparatur</b>	%	<b>100</b>	<b>100,875,000</b>	<b>100</b>	<b>100,875,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Peserta Diklat Kapasitas Sumberdaya Aparatur	orang	85	100,875,000	85	100,875,000	100	100
<b>3.06 . 3.06.01 . 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Capaian nilai evaluasi kinerja</b>	<b>angka</b>	<b>80</b>	<b>178,750,000</b>	<b>80</b>	<b>178,750,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.06 . 3.06.01 . 06.09	Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	Jumlah Pendampingan Implementasi SMM	kali	8	100,000,000	8	100,000,000	100	100
3.06 . 3.06.01 . 06.17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Dokumen Perencanaan/evaluasi yang dihasilkan	dokumen	12	78,750,000	12	78,750,000	100	100
		Jumlah Peserta FGD Perencanaan	orang	60		60	-	100	
		Jumlah Peserta FGD Monev	orang	30					
<b>3.06 . 3.06.01 . 15</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/terulang</b>	%	<b>7</b>	<b>2,430,450,000</b>	<b>7</b>	<b>2,430,450,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.06 . 3.06.01 . 15 . 12	Pelayanan Kemetrolgian Daerrah	Belanja Operasional UPT Metrologi	bulan	12	2,430,450,000	12	2,430,450,000	100	100
		Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrolgian	orang	240		240	-	100	
		Jumlah Penyediaan Alat Standar Pelayanan Kemetrolgian	paket	1		1	-	100	
		Jumlah Gedung UPT Yang Terpelihara	unit	1		1	-	100	
		Jumlah Penyediaan Alat Standar Kemetrolgian (DAK)	paket	1		1	-	100	
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Kemetrolgian Roda 4 (DAK)	unit	2		2	-	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jumlah Pengadaan Electric Generating Set	unit						
		Jumlah Kendaraan Bermotor Khusus	unit						
		Jumlah Pengadaan Alat Kalibrasi	unit						
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13	Pelayanan Pengamanan Perdagangan	Kajian Pupuk Bersubsidi	dokumen			-	-		
		Kajian Supply Chain Kebutuhan Pokok Strategis	dokumen			-	-		
		OPM Barang Kebutuhan Pokok Strategis	kali			-	-		
<b>2.04 . 3.06.01 . 16</b>	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Pembebasan tanah pasar dari status tanah kas desa menjadi tanah milik pemda</b>	<b>lokasi</b>			-	-		
2.04 . 3.06.01 . 16 . 12	Pengadaan tanah dari tanah kas desa	Tanah kas desa yang dibebaskan	m2			-	-		
		Jumlah Dokumen Appraisal	dokumen			-	-		
<b>3.06 . 3.06.01 . 17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>	<b>Jumlah nilai ekspor</b>	<b>US\$</b>	<b>75.180.000</b>	<b>1,724,005,000</b>	<b>75.180.000</b>	<b>1,724,005,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.06 . 3.06.01 . 17.09	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi pengusaha	Kajian Peraturan Perijinan Usaha Perdagangan	dokumen	1	285,755,000	1	285,755,000.00	100	100
		Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin Usaha Bidang Perdagangan	orang	120				100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jumlah Peserta Monev Ijin Usaha Bidang Perdagangan	orang	30				100	
		Publikasi Lewat Media Cetak dan Elektronik	kali	12				100	
		Terlaksananya Publikasi Melalui Sosial Media	paket	1				100	
3.06 . 3.06.01 . 17.16	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan MPLN, Kemasan, serta Pelatihan Pemasaran dan Distribusi Perdagangan	orang	120	1,438,250,000	120	1,438,250,000.00	100	100
		Jumlah Pameran Produk yang Difasilitasi / Diikuti	kali	8		8	-	100	
		Jumlah peserta pelatihan Kemasan	orang			-	-		
		Jumlah peserta pelatihan pemasaran dan distribusi	orang			-	-		
		Jumlah peserta pelatihan pemasaran online	orang			-	-		
		Jumlah hadiah lomba stand Bantul Expo	paket			-	-		
<b>3.06 . 3.06.01 . 18</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>Persentase deviasi harga komoditas strategis</b>	%	<b>≤ 5</b>	<b>369,000,000</b>	<b>≤ 5</b>	<b>369,000,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.06 . 3.06.01 . 18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Terlaksananya Operasi Pasar Murni (OPM) barang kebutuhan pokok strategis	kali	3	192,175,000	3	192,175,000.00	100	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Jumlah Kajian Pemetaan Toko Modern dan Pasar Tradisional; Jumlah Kajian Pemetaan Agen LPG, Pangkalan LPG, dan Gudang Kebutuhan Pokok Strategis; Jumlah Pemetaan Jalur Distribusi Bahan Pokok Strategis	dokumen	3		3		100	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	Honorarium manajer pengelola gudang SRG	orang bulan		87,825,000			100	100
		Operasional Gudang SRG	bulan						
		Jumlah peserta sosialisasi SRG	orang	150		150	-	100	
		Dokumen Lingkungan Kawasan Gudang SRG	dokumen			-	-		
		Jumlah Penyediaan Baliho SRG	unit	1		1	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16	Peningkatan pelayanan perdagangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Terkait Pelayanan Perdagangan	orang	120	89,000,000	120	89,000,000.00	100	100
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	jenis pengawasan	9		9	-	100	
<b>3.06 . 3.06.01 . 19</b>	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>	<b>Jumlah kawasan pedagang kaki lima</b>	<b>kawasan</b>	<b>2</b>	<b>1,700,875,000</b>	<b>2</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.06 . 3.06.01 . 19.03	Kegiatan Penempatan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Tempat Kuliner (PK)	lokasi	1	750,000,000	1	750,000,000.00	100	100
3.06 . 3.06.01 . 19.07	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Relokasi Pedagang Pantai Depok	orang	100	950,875,000	100	950,875,000.00	100	100
		Jumlah Kajian Penataan PKL	dokumen	1		1	-	100	
		Jumlah Lokasi Terpadu Pedagang Kaki Lima dan Asongan	lokasi	2		2	-	100	
		Jumlah Penyediaan Tenda Bagi PKL	unit	50		50	-	100	
<b>3.06 . 3.06.01 . 20</b>	<b>Program Pemberdayaan Pedagang</b>	<b>Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat</b>	%	<b>4,4</b>	<b>1,098,125,000</b>		<b>1,098,125,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3.06 . 3.06.01 . 20.05	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Jumlah Peserta Pendampingan APPSI; Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar; Jumlah Peserta Sarasehan Pedagang Pasar; Jumlah Peserta Grebeg Pasar	orang	1702	1,098,125,000	1,702	1,098,125,000.00	100	100
		Promosi Pasar yang Terlaksana	kali	10		10	-	100	
		Peresmian Pasar yang Terlaksana	kali	1		1	-	100	
		Jumlah Pengadaan Baliho	unit	6		6		100	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Evaluasi Dana Bergulir; Evaluasi pendapatan; Evaluasi intensifikasi pengelola MCK	kali	36	80,570,000	36	80,570,000	100	100

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 dan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan  
Kabupaten Bantul

NO.	INDIKATOR	TARGET				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Jumlah pasar tipe A (unit)	1	1	2	3	1	1	2	3	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
2	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan (persen)	4,61	4,76	6,33	6,62	6,73	4,76	6,33	6,62	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen)	7	7,10	7,15	7,20	7,09	7,10	7,15	7,20	Realisasi 2018 dan proyeksi 2019-2020 memakai angka target

Dalam mencapai tujuan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

**Tabel 2.1**

**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul**

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan					
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Kuantitatif	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{ tahun } (n - 1)}{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip per bulan, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kualitas pasar rakyat					
5.	Jumlah pasar tipe A	Kuantitatif	Jumlah pasar dengan tipe A	Perhitungan/penilaian jumlah pasar tipe A yang kriterianya sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Pasar	Recheck data dan perhitungan; kunjungan ke lapangan; entri data ke e-sakip per bulan; melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekspor					
6.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Kuantitatif	$\frac{\text{nilai ekspor tahun } n - \text{ nilai ekspor tahun } (n - 1)}{\text{nilai ekspor tahun } n - 1} \times 100\%$	Data bersumber dari jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY kemudian diolah oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul. SKA adalah surat keterangan kebangsaan suatu barang yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah negara tujuan ekspor tertentu untuk memberitahukan bahwa barang tersebut berasal/diolah dari suatu negara	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke DIY; entri data ke e-sakip per bulan, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan

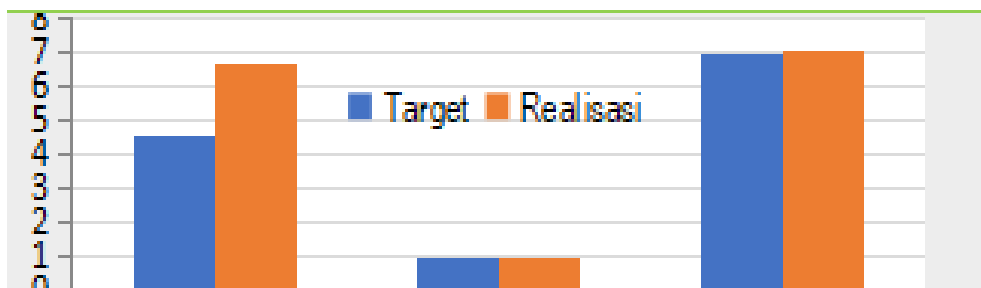
Pencapaian indikator Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja  
DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,61	6,73	145,99
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	1	100.00
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7,09	101.29

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **115,76%**.

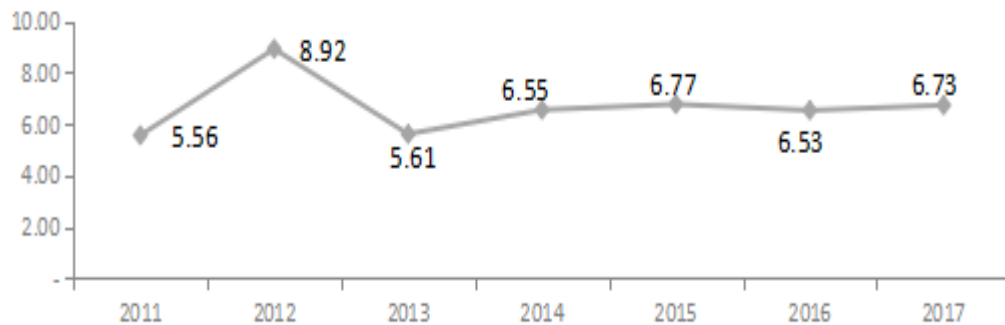
	Pertumbuhan PDR B sub kategori per dagangan besar da n eceran, bukan m obil dan sepeda m otor	Jumlah pasar tipe A	Pertumbuhan Nilai Ekspor
■ Target	4.61	1	7
■ Realisasi	6.73	1	7.09



Gambar 2.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.



Gambar 2.2 PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2017 (diolah oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul).

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2017 yakni:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Kategori pasar rakyat tipe A didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/M\_DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam peraturan tersebut diuraikan kriteria pasar tradisional tipe A yaitu:

- a. Luas lahan minimal 3.000 m<sup>2</sup>
- b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW daerah setempat;
- d. Jumlah pedagang minimal 150 pedagang
- e. Bangunan utama berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
  1. Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
  2. Ruang serbaguna untuk pembinaan pedagan, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m<sup>2</sup>
  3. Toilet/wc
  4. Tempat ibadah
  5. Pos ukur ulang (minimal 2x2 m)
  6. Pos kesehatan
  7. Pos keamanan
  8. Drainase (ditutup dengan grill)
  9. Tempat penampungan sampah sementara
  10. Gedung tempat penyimpanan stok barang
  11. Area bongkar muat;
  12. Tempat parkir
  13. Area penghijauan
  14. Hidran/alat pemadam kebakaran
  15. Instalasi air bersih dan jaringan listrik;
  16. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
  17. Telekomunikasi
  18. Sistem informasi harga dan stok
  19. Papan pengumuman informasi harga harian
- f. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
- g. Pasar dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar
- h. Operasional pasar dilakukan setiap hari
- i. CCTV yang terhubung secara online untuk memantau aktifitas perdagangan

Dari sekian banyak kriteria, untuk kriteria luas, jumlah pedagang, dan operasional pasar sebenarnya sudah dipenuhi oleh 4 pasar besar yakni pasar Imogiri, pasar Bantul, pasar Niten, dan Pasar Piyungan. Namun hanya satu pasar yang telah memenuhi semua kriteria pasar tipe A yaitu

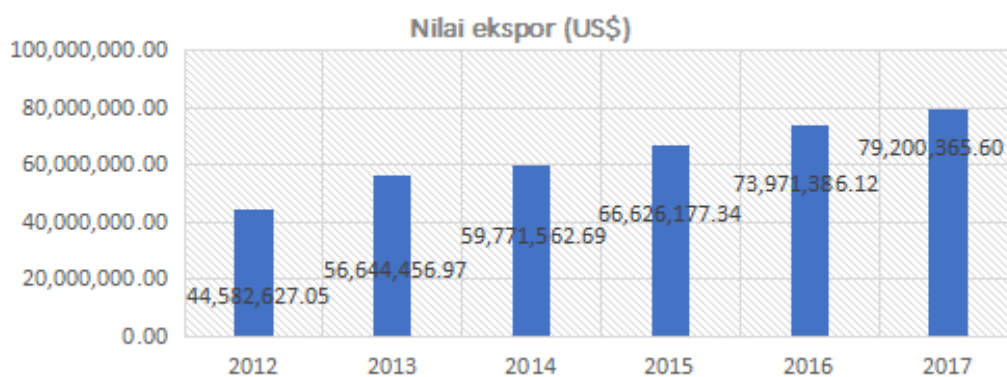
Pasar Imogiri. Dengan demikian target pasar tipe A sebanyak 1 unit pada tahun 2017 tercapai 100 persen. Diharapkan pada akhir tahun Renstra (2021) 3 pasar lainnya dapat memenuhi semua kriteria pasar tipe A sehingga pasar tipe A sebanyak 4 unit pada akhir tahun 2021 tercapai.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat ini didukung oleh program:

1. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2. Program Pemberdayaan Pedagang
3. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pedesaan

Indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor adalah pertumbuhan nilai ekspor. Capaian indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah sebesar 7%, realisasi sebesar 7,09%, tercapai 101,29% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** dengan nilai ekspor sebanyak 79.200.365,60 US\$, jumlah komoditi yang diekspor sebanyak 25 komoditi, jumlah eksportir sekitar 37 eksportir, serta terdapat 44 negara tujuan ekspor.

Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti sarung tangan, tekstil, furniture, dan handycraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Perkembangan ekspor Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.3. Perkembangan Ekspor 2014-2017

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat ini didukung oleh program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dan Kerjasama Informasi dengan Mass Media.



Dari kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp24.814.281.880,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp19.625.360.516,00 atau sebesar 79,09%.

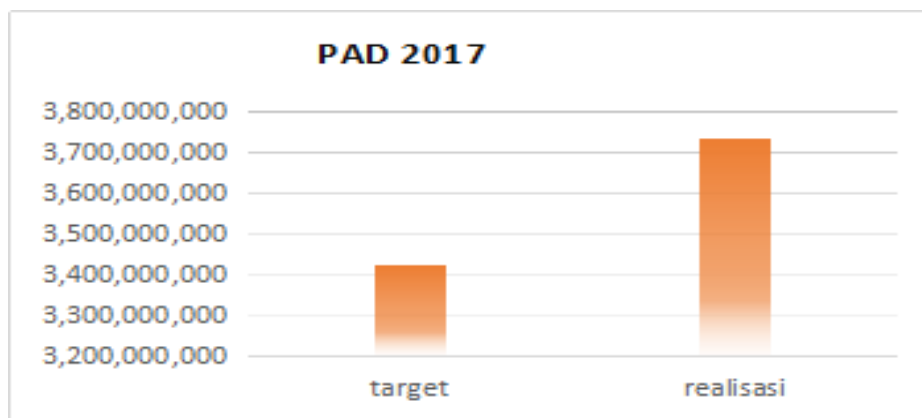
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa	%
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.156.520.000	3.558.013.904	598.506.096	14,40
2	Jumlah pasar rakyat tipe A	9.579.282.500	9.088.899.292	490.383.208	5,12
3	Pertumbuhan ekspor	1.532.763.000	1.477.701.550	55.061.450	3,59
<b>Jumlah</b>		1.532.763.000	1.477.701.550	1.143.950.754	4,61
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		9.545.716.380	5.500.745.770	4.356.795.016	45,64
<b>Total Belanja langsung</b>		24.814.281.880	19.625.360.516	5.188.921.364	79,09

Sumber: [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

Dinas Perdagangan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yaitu dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, MCK pasar, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari target PAD sebesar Rp 3.423.000.000,00 mampu tercapai sebesar Rp 3.732.640.519 atau terealisasi sebesar 100,05%. PAD terbesar bersumber dari retribusi pelayanan pasar berupa sewa kios/los.



Gambar 2.4 Target dan Realisasi PAD Tahun 2017

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perdagangan I Tahun 2017 adalah **81,53**.

*Tabel 2.4 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan*

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 81,53 dan melihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul kategori **“SANGAT BAIK”**.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perdagangan sebagai berikut:

- a. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan;
- b. Kualitas Data;
- c. Kompetensi SDM;
- d. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
- e. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
- f. Terbatasnya daya saing produk UMKM ;
- g. Laju impor dan produk dari luar daerah;
- h. Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa;
- i. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat;
- j. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal;
- k. Maraknya rentenir;
- l. Kondisi pasar yang terkesan kumuh;
- m. Belum tertibnya usaha PKL;
- n. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
- o. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

**Kekuatan (STRENGTHS)**

1. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi perdagangan
2. Potensi pelaku usaha perdagangan dari segi kuantitatif cukup besar.
3. Adanya peraturan/ketentuan bagi perdagangan

**Kelemahan (WEAKNESSES)**

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
2. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar
3. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku
4. Terbatasnya daya saing produk UMKM
5. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;
6. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.

**Peluang (OPPORTUNITIES)**

1. Berkembangnya industri kreatif
2. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;
3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan;
4. Meningkatnya akses pasar ekspor
5. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
6. Kabupaten Bantul sebagai city logistic
7. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD
8. Menurut Data Bank Dunia jumlah kelas menengah naik  $\pm$  7 juta / tahun sehingga mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat
9. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan Bandara dan Kawasan Industri

**Ancaman (THREATS)**

1. Lemahnya penegakan hukum ( low enforcement );
2. Maraknya rentenir;
3. Globalisasi dan perdagangan bebas;
4. Tingginya jumlah toko modern
5. Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok;
6. Terbatasnya infrastruktur ekonomi;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah

Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
		INTERNAL	EKSTERNAL	
SDM	Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai	Penerapan SP dan SOP yang baku, sistematis dan terkontrol belum optimal	Belum adanya anjab aparatur Dinas Perdagangan yang komprehensif guna menentukan jumlah dan kompetensi aparatur yang ditempatkan di Dinas Perdagangan	Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan  Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional  Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrolgian serta Aparatur PPNS
Sarana dan Prasarana	Peralatan pelayanan untuk bidang perdagangan termasuk metrologi terbatas		Peralatan pelayanan tertentu untuk bidang kemetrolgian sangat mahal	Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolgian sangat mahal dan jumlahnya terbatas  Optimalisasi pelaksana terganggu karena keterbatasan dukungan peralatan.  Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung
Data base	Data belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Akses informasi dan penggalian karakteristik data masih lemah.	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Validitas dan kecukupan data kurang memadai	Data di Pemerintah kabupaten Bantul belum terintegrasi	Database perdagangan yang belum optimal  Informasi pasar domestik dan ekspor yang kurang memadai
Pengawasan	Fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi belum optimal			Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha  Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam RKPD Tahun 2019 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.6.. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.6.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019**  
**Kabupaten Bantul**

**Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Capaian nilai AKIP</b>	<b>83</b>	<b>7,409,838,273</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Capaian nilai AKIP</b>	<b>83</b>	<b>10,660,450,000</b>	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				560,450,000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				560,450,000	
	Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1,322,047,100	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1,600,000,000	Menambah jumlah pameran produk ekspor yang difasilitasi; ekstra fooding/vitamin untuk petugas lapang di pasar- pasar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				5,527,341,173	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				8,500,000,000	pembebasan TKD menjadi milik pemda sehingga status tanah untuk pembangunan/rehab pasar menjadi clear and clean
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	1,593,565,000	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	1,593,565,000	
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional				563,662,500	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional				563,662,500	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				353,815,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				353,815,000	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				283,662,500	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				283,662,500	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				342,925,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				342,925,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				49,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				49,500,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Cakupan peningkatan kapastitas sumberdaya aparatur</b>	<b>100</b>	<b>110,962,500</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Cakupan peningkatan kapastitas sumberdaya aparatur</b>	<b>100</b>	<b>110,962,500</b>	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				110,962,500	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				110,962,500	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Capaian nilai evaluasi kinerja</b>	<b>81</b>	<b>186,625,000</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Capaian nilai evaluasi kinerja</b>	<b>81</b>	<b>186,625,000</b>	
	Penyusunan sistem manajemen mutu				100,000,000	Penyusunan sistem manajemen mutu				100,000,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				86,625,000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				86,625,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		<b>Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapan yang ditera/terulang)</b>	<b>7.5</b>	<b>2,722,027,000</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		<b>Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapan yang ditera/terulang)</b>	<b>7.5</b>	<b>3,222,027,000</b>	
	Pelayanan Kemetrollogian Daerah				2,722,027,000	Pelayanan Kemetrollogian Daerah				3,222,027,000	Pendampingan APBD untuk DAK metrologi legal
	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>		<b>Jumlah nilai ekspor</b>	<b>76.722.600</b>	<b>1,923,608,500</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>		<b>Jumlah nilai ekspor</b>	<b>76.722.600</b>	<b>2,148,608,500</b>	
	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi pengusaha				338,783,500	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi pengusaha				338,783,500	
	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah				1,584,825,000	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah				1,809,825,000	Penambahan jumlah peserta pelatihan pemasaran
	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>		<b>Persentase deviasi harga komoditas strategis</b>	<b>≤ 5</b>	<b>405,900,000</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>		<b>Persentase deviasi harga komoditas strategis</b>	<b>≤ 5</b>	<b>405,900,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	pengembangan pasar dan distribusi barang produk				211,392,500	pengembangan pasar dan distribusi barang produk				211,392,500	
	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang				96,607,500	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang				96,607,500	
	Peningkatan pelayanan perdagangan				97,900,000	Peningkatan pelayanan perdagangan				97,900,000	
	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>		<b>Jumlah kawasan pedagang kaki lima</b>	<b>3</b>	<b>1,870,962,000</b>	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>		<b>Jumlah kawasan pedagang kaki lima</b>	<b>3</b>	<b>1,870,962,000</b>	
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan (PIK)				825,000,000	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan (PIK)				825,000,000	
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				1,045,962,000	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				1,045,962,000	
	<b>Program Pemberdayaan Pedagang</b>		<b>Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat</b>	<b>4,6</b>	<b>1,207,937,500</b>	<b>Program Pemberdayaa n Pedagang</b>		<b>Pertumbu han omzet pedagang pasar rakyat</b>	<b>4,6</b>	<b>1,207,937,500</b>	
	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar				1,207,937,500	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar				1,207,937,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Progam Penataan Pasar Rakyat</b>		<b>cakupan jumlah kondisi pasar baik</b>	<b>72,73%</b>	<b>10,295,632,000</b>	<b>Progam Penataan Pasar Rakyat</b>		<b>cakupan jumlah kondisi pasar baik</b>	<b>72,73%</b>	<b>10,295,632,000</b>	
	Pembangunan dan Rehabilitasi pasar rakyat				4,459,355,000	Pembangunan dan Rehabilitasi pasar rakyat				4,459,355,000	
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI				12,650,000	Pengembang an Pasar Rakyat Ber SNI				12,650,000	
	Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)				5,735,000,000	Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)				5,735,000,000	
	Intensifikasi Pendapatan Pasar				88,627,000	Intensifikasi Pendapatan Pasar				88,627,000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>27,727,057,773</b>					<b>30,109,104,500</b>	<b>-</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum Perangkat Daerah dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, seperti tersaji dalam Tabel 2.7.

**Tabel 2.7. USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN  
TAHUN 2019 KABUPATEN BANTUL**

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2		3	4	5	6
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengembangan pasar dan ekspor daerah	desa Banguntapan	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemasaran	40 orang (2 kelompok @20 orang)	PIK (forum Perangkat Daerah)
			Desa Gumulan, Desa Gluntung, Desa Glagahan, Desa Tegalsempu dan Desa Tegal layang	Jumlah peserta pelatihan perijinan dan manajemen pemasaran	200 orang (10 kelompok @20 orang)	PIK (forum Perangkat Daerah)

			Gadingsari	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemasaran	40 orang (2 kelompok @20 orang)	PIK (forum Perangkat Daerah)
			Desa Gadingsari	Terlaksananya pelatihan manajemen pemasaran di tingkat nasional/internasional bagi produk unggulan industri kecil	40 orang (2 kelompok @20 orang)	PIK (dalam aplikasi SEPAKAT)
2	Penataan Pasar Rakyat	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Srihardono	Terlaksananya rehab pasar Pundong	1 pasar	non PIK
			Desa Ngestiharjo	Terlaksananya pembangunan kios pasar desa Ngestiharjo	1 kios	PIK (dalam aplikasi SEPAKAT)
			Desa Sidomulyo	Terlaksananya rehabilitasi/pembangunan pasar Turi	1 pasar	PIK (dalam aplikasi SEPAKAT)

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”.**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
- b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2019 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN)
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
10. Peningkatan perlindungan konsumen- % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha

12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan di atas, tujuan yang bisa ditetapkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain:

- Peningkatan pengamanan perdagangan
- Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Pertumbuhan ekspor non migas
- Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yaitu:

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.*

untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.



Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan urusan perdagangan adalah misi ketiga yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2016-2021 maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2019 yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
2. Terwujudnya kualitas produk perdagangan

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur.

Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pasar rakyat
2. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Target Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A (unit)	Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n (unit)	2
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan (persen)	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n - \text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n-1}{\text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n-1} \times 100\%$ (persen)	6,33
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen)	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } n-1}{\text{Nilai ekspor tahun } n-1} \times 100\%$ (persen)	7,15

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD DIY, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perdagangan dalam Renja 2019 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2016-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan

misi Bupati Bantul, pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekspor, pengawasan dan distribusi perdagangan, dan pengembangan pasar.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2019:

Jumlah Program	:	9
Jumlah Kegiatan	:	24
Pagu Indikatif APBD	:	Rp 21.112.311.345
Pagu Indikatif APBN/DAK	:	Rp 40.000.000.000

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul di Tahun 2019 adalah :

I. Program Utama Urusan Perdagangan:

<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan</b>
Pelayanan Kemetrologian Daerah
<b>Program dan Peningkatan Pengembangan Ekspor</b>
Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi Pengusaha
Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah
<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk
Pengembangan Pengelolaan Gudang Dengan Sitem Resi Gudang
Peningkatan Pelayanan Perdagangan
<b>Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan</b>
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan (PIK)
Pemberdayaan Pedagang Kakilima dan Asongan
<b>Program Pemberdayaan Pedagang</b>
Peningkatan SDM ,Kelembagaan dan Promosi Pasar
<b>Program Penataan Pasar Rakyat</b>
Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat
Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI
Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)
Intensivikasi Pendapatan Pasar

Program Pendukung:

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
Penyediaan Jasa , Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantorn
<b>Peningkatan Program Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
Pengadaan /Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
<b>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>
Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi,Bimtek,dan Peningkatan Kapasitas
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja</b>
Penyusunan Sintem Managemen Mutu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Barang,Kepegawaian

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**  
**TAHUN ANGGARAN : 2019**

SKPD : Dinas Perdagangan

Kode	Urutan / Bidang Urutan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cetakan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00	Utaran PBIK				51.190.371.330			51.190.371.330	
000	Bidang Perdagangan				51.190.371.330			51.190.371.330	
000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Cakupan pelayanan		1 orang	16.120.196.279		1 orang	1.606.230.279	
000.000.01.000	Penyediaan Jasa, Perawatan, dan Pengembangan Perkantoran	Indikator : Jumlah Honor Pengantar Pengiriman dan Barang Indikator : Jumlah Jasa Asst Tula Kantor Indikator : Jumlah Jasa Asst Lurah dan BKK/ombud Indikator : Jumlah Pengin, Mahal dan Sederet Pns Lainnya Indikator : Jumlah Perawatan Perawatan dan Gelas Perawatan Indikator : Jumlah Beker Perawatan Takip Indikator : Jumlah Surat Kabar / Majalah Indikator : Jumlah Jasa Sewa Gedung Indikator : Jumlah Pengiriman Hasil : Dibangun terdapat administrasi perkantoran yang mendukung kinerja tugas dan fungsi SKPD	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 20 Plaza Mayaj	200 Ors 20 Jans 10 Jans 2000 Lembar 20 Jans 10 Motor 1000 Sampul 20 Jans 14000 Lembar 8 Person	640.001.000	APBD Kabupaten Bantul	500 Ors 20 Jans 10 Jans 2000 Lembar 20 Jans 10 Motor 1000 Sampul 20 Jans 14000 Lembar 8 Person	600.400.000	
000.000.01.000	Penyediaan Hapabilitas, Kelembagaan dan Komunitas	Indikator : Jumlah Peserta Kegiatan Indikator : Jumlah Peserta Kegiatan Indikator : Jumlah Fasilitas Kegiatan Indikator : Jumlah Fasilitas Kegiatan Indikator : Jumlah Fasilitas Kegiatan Hasil : Dibangun terdapat administrasi perkantoran yang mendukung kinerja tugas dan fungsi SKPD	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Kecamatan, DTY dan Lurah DTY	500 Orang 2047 Orang 2040 Or 170 Or 18 Person	1.102.401.000	APBD Kabupaten Bantul	500 Orang 2047 Orang 2040 Or 142 Or 18 Person	1.022.341.000	
000.000.01.000	Penyediaan Jasa Pengada Pelayanan Perkantoran	Indikator : Jumlah pembelian barang Indikator : Jumlah pembelian barang Indikator : Jumlah pembelian barang Indikator : Jumlah pembelian barang Hasil : Dibangun terdapat administrasi perkantoran yang mendukung kinerja tugas dan fungsi SKPD		2440 or 2440 or 16 paket/bulan 1 paket 75 paket	5.120.170.380	APBD Kabupaten Bantul	2440 or 2440 or 16 paket/bulan 1 paket 75 paket	4.807.341.170	
000.000	Program Peningkatan Service dan Promosi Aparatur	1. Cakupan pelayanan		1 Person	1.200.000.000		1 Person	1.200.000.000	
000.000.01.000	Pengadaan/Rehabilitasi Kamboran Citrus/Quarantena	Indikator : Jumlah penyediaan kamoran Hasil : Dibangun terdapat administrasi perkantoran yang mendukung kinerja tugas dan fungsi SKPD	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	2 Unit 2 Person	40.000.000	APBD Kabupaten Bantul	2 Unit 2 Person	40.000.000	

SKPD : Dinas Perdagangan

Kode	Unsur / Bidang Unsur Bermanfaat / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana / Page Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana / Page Indikatif
								8	9
000.0001.02.001	Pengadaan Perakitan dan Peralengkapan	Keluaran : Jumlah Peralengkapan Peralengkapan Kantor (Peralengkapan Kantor, AC, Kipas Angin, Item peralat, kawatpaku, dsb.) Keluaran : Jumlah Peralengkapan Peralengkapan Kantor (Komputer dan kawatpaku, Laptop, Printer) Misi : Dilakukan Tercepat Tercepatnya Peralengkapan Peralengkapan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Konsistensi Tugastugas dan Fungsi DPC	Dinas Perdagangan	01 Unit 01 Unit 02 Person	379.270.440	APBD Kabupaten Kota	01 Unit 01 Unit 02 Person	379.270.440	
000.0001.02.002	Perawatan Rumah dan Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Terpelihara Keluaran : Jumlah Ruang Ruang Ruang Kerja yang Cemerlang Misi : Dilakukan Tercepat Tercepatnya Peralengkapan Peralengkapan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Konsistensi Tugastugas dan Fungsi DPC	Dinas Perdagangan	1 Unit 1 Unit 20 Person	240.892.900	APBD Kabupaten Kota	1 Unit 1 Unit 20 Person	240.892.900	
000.0001.02.003	Perawatan Kesehatan Dinas/Operasional	Keluaran : Jumlah Kesehatan Dinas Terpelihara Keluaran : Sumbangnya SSM Operasional Misi : Dilakukan Tercepat Tercepatnya Peralengkapan Peralengkapan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Konsistensi Tugastugas dan Fungsi DPC	Dinas Perdagangan	01 Unit 22000 Unit 01 Person	620.220.000	APBD Kabupaten Kota	01 Unit 22000 Unit 01 Person	620.220.000	
000.0001.02.004	Perawatan Perakitan dan Peralengkapan	Keluaran : Jumlah Perakitan, Misi dan Peralengkapan Kantor Terpelihara Misi : Dilakukan Tercepat Tercepatnya Peralengkapan Peralengkapan Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Konsistensi Tugastugas dan Fungsi DPC	Dinas Perdagangan	40 Unit 4 Person	40.900.000	APBD Kabupaten Kota	40 Unit 4 Person	40.900.000	
130.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur aparatur		0 Person	140.942.000		0 Person	140.942.000	
000.0001.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Keluaran : Jumlah Peserta atau Angkutan atau Peserta Angkutan Misi : Dilakukan Tercepat Tercepatnya peningkatan kapasitas aparatur yang Mendukung Konsistensi Tugastugas dan Fungsi DPC	DGN Luar DGN	80 orang 100 person	110.240.000	APBD Kabupaten Kota	80 orang 100 person	110.240.000	
130.03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Capaian nilai evaluasi kinerja		0 Angka	220.225.000		0 Angka	220.225.000	
000.0001.05.008	Persiapan sistem manajemen risiko	Keluaran : Jumlah prosedur yang implementasi SIM Misi : Dilakukan Tercepat Tercepatnya persiapan risiko program yang Mendukung Konsistensi Tugastugas dan Fungsi DPC	Dinas Perdagangan	0 Unit 00 person	100.000.000	APBD Kabupaten Kota	0 Unit 00 person	100.000.000	
000.0001.05.010	Persiapan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepelatihan dan kebidayaan	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan evaluasi yang diterbitkan Keluaran : Jumlah peserta PDD perencanaan Keluaran : Jumlah peserta PDD evaluasi Misi : Dilakukan Tercepat Tercepatnya persiapan risiko program yang Mendukung Konsistensi Tugastugas dan Fungsi DPC	Dinas Perdagangan	10 dokumen 00 orang 40 orang 44 person	40.000.000	APBD Kabupaten Kota	10 dokumen 00 orang 40 orang 44 person	40.000.000	





SOPD : Dinas Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Profilisasi Mula Rencana Tahun 2020	
			Lokal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Page Indikasi	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Page Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
000.00001.18.011	Peningkatan pelayanan perdagangan	Keluaran : Jumlah Kegiatan Perdagangan Yang Dilakukan Dan Utang Keluaran : Jumlah Peserta PDB Yang Didasarkan Hasil : Ketertarikan pengunjung dan peningkatan perdagangan serta tercapainya nilai tukar perdagangan bagi pelaku usaha	17 Kecamatan Kab. Bantul	3 juta 80 orang 80 persentase	10.075.000	APBD Kabupaten		12 juta 100 orang 80 persentase	10.300.000
000.00018	Program pembinaan pedagang kecil/Usaha dan Angkan	1. Jumlah kegiatan pedagang kecil		1 kegiatan	1.182.475.000		1 kegiatan	1.170.800.000	
000.00001.18.003	Regulasi pemetaan tempat berusaha bagi pedagang kecil/Usaha dan Angkan	Keluaran : jumlah usaha kecil Hasil : Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil Liris Dan Angkan Serta Tercapainya Target Utama Kinerja Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kab. Bantul	1 kegiatan 80 persentase	620.000.000	APBD Kabupaten	1 kegiatan 80 persentase	620.000.000	
000.00001.18.007	Pembinaan Pedagang Kecil Liris dan Angkan	Keluaran : Jumlah Terdaftar PML Keluaran : Jumlah kegiatan PML yang terdorong Hasil : Tercapainya jumlah PML yang terdorong, jumlah kegiatan, besak dan jumlah reg. sehingga meningkatkan ekonomi para PML, pedagang	10 Pesisir	20 unit 1 kegiatan 80 persentase	800.000.000	APBD Kabupaten	20 unit 1 kegiatan 80 persentase	1.040.000.000	
000.00018	Program Pembinaan Pedagang	1. Jumlah usaha kecil pedagang kecil/Usaha		11 kegiatan	1.121.800.074		11 kegiatan	1.120.701.000	
000.00001.02.008	Peningkatan SDM, Keterbacaan dan Proses Pasar	Keluaran : Pembinaan APMS Keluaran : Peserta Pelatihan Pedagang Pasar 10 kali Keluaran : Lomba Pasar Bersih Keluaran : Gelar Pasar Keluaran : Perayaan Pasar Keluaran : Penyelenggaraan Adhese dan Victoria Keluaran : Balho 2 (satu) kali Keluaran : Balho 1 (satu) kali Hasil : Peningkatan Kualitas Manajemen Pedagang		240 orang 620 orang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 unit 2 unit 80 persentase	1.001.000.000	APBD Kabupaten	240 orang 620 orang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 unit 2 unit 80 persentase	1.320.000.000	
000.00011	Program Kerjasama Pasar Rakyat	1. Jumlah pasar kecil pasar rakyat		1 kegiatan	45.700.000.000		1 kegiatan	46.000.000.000	
000.00001.02.001	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Keluaran : Jumlah DGD perdagangan pasar Keluaran : jumlah pasar yang dibangun/rehabilitasi Keluaran : jumlah pasar yang direhabilitasi Keluaran : Terbangunnya market pasar DGD dan nilai pasar Hasil : Dukungan terhadap kegiatan pasar rakyat dan peningkatan pasar rakyat	Pasar Rakyat	10 kegiatan 1 pasar 10 pasar 2 unit 87,74 %	2.004.500.000	APBD Kabupaten	10 kegiatan 1 pasar 10 pasar 2 unit 87,74 %	4.400.000.000	
000.00001.02.008	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SKB	Keluaran : Jumlah pengembangan Perdagangan Pasar Rakyat Ber SKB (Pasar Rakyat) Hasil : Meningkatkan Kualitas Pasar dan SKB (Pasar Rakyat)	Pasar Rakyat, Kabupaten Bantul	1 Pasar 10 Skala	20.400.000	APBD Kabupaten	1 Pasar 10 Skala	20.000.000	
000.00001.02.003	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Keluaran : Terbangunnya perdagangan pasar rakyat Hasil : Dukungan terhadap kegiatan pasar rakyat dan peningkatan pasar rakyat	Pasar Rakyat dan Pasar Persegi	1 unit 80 %	60.000.000.000	Dana Hibah Monev	1 unit 80 %	6.000.000.000	

LKPD : Dirum Perdagangan

Kode	Urutan / Bidang Urutan Pemertintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Praktisan Mula Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Page Indikasi <sup>1</sup>	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Page Indikasi <sup>2</sup>
000.0001.18.019	Peningkatan pelayanan perdagangan	Keluaran : Jumlah Kegiatan Perdagangan Yang Dipertukur Dan Diumut Keluaran : Jumlah Peserta PDD Yang Didukung Hasil : Efektifitasnya peningkatan dan pengurusan perdagangan serta tercapainya nilai tukar perdagangan bagi pelaku usaha	17 Kecamatan Nias Barat	3 juta 30 orang 30 peserta	10.070.000	APBD Kabupaten Nias		12 juta 100 orang 30 peserta	10.000.000
000.18	Program pembinaan pedagang kecil dan menengah	1. Jumlah aktivitas pedagang kecil			1.020.000.000				1.070.000.000
000.0001.18.003	Kegiatan pameran tempat berjualan bagi pedagang kecil dan menengah	Keluaran : jumlah pasar skala mikro Hasil : Meningkatnya Partisipasi Pedagang Mikro Dalam Acara Pameran Serta Terpajanya Tingkat Wisata Kuliner Bagi Masyarakat Kabupaten	Nias, Sibola	1 pameran 30 peserta	220.000.000	APBD Kabupaten Nias		1 pameran 30 peserta	400.000.000
000.0001.18.007	Pembudayaan Pedagang Kecil Liris dan Asongan	Keluaran : Jumlah Tenak Liris PHL Keluaran : Jumlah Koneksi PHL yang terbentuk Hasil : Terpajanya koneksi PHL yang berlisensi, resmi, nyaman, bersih dan mudah bagi, sehingga meningkatkan volume pasar PHL, mendidik	13 Pasar	20 unit 1 pameran 30 peserta	300.000.000	APBD Kabupaten Nias		30 unit 1 pameran 30 peserta	1.040.000.000
000.30	Program Pembudayaan Pedagang	1. Peningkatan peran pedagang kecil rakyat			1.001.000.071				1.030.701.000
000.0001.02.008	Peningkatan SDM, Keterbacaan dan Proses Pasar	Keluaran : Pembinaan APPEI Keluaran : Peserta Pemasaran Pedagang Mula 13 kali Keluaran : Jumlah Pasar Bersih Keluaran : Jumlah Pasar Keluaran : Pemetaan Pasar Keluaran : Penyelenggaraan Adhikarisi dan Volunter Keluaran : Balok 2 (dua) maha Keluaran : Balok 1 (satu) maha Hasil : Peningkatan kualitas Manajemen Pedagang		210 orang 300 orang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 unit 2 unit 30 peserta	1.001.000.071	APBD Kabupaten Nias		210 orang 300 orang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 unit 2 unit 100 peserta	1.020.701.000
000.22	Program Kerahan Pasar Rakyat	1. cakupan jumlah pasar pasar baik			12.707.300.000				10.007.300.000
000.0001.02.001	Peningkatan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Keluaran : Jumlah DSD penitipasan pasar Keluaran : jumlah pasar yang dibangunkan/direhabilitasi Keluaran : jumlah pasar yang direhabilitasi Keluaran : Terbangunnya pasar/pasar liris dan mikro Nias Hasil : Cakupan kerahan pasar yang cukup jumlah pasar pasar baik	Pasar Rakyat	3 Dikemas 1 pasar 10 pasar 2 unit 27,74 %	2.014.340.000	APBD Kabupaten Nias		3 Dikemas 1 pasar 10 pasar 2 unit 27,74 %	4.400.000.000
000.0001.02.002	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SKB	Keluaran : Jumlah pengembangan/pengembangan Pasar Rakyat Ber SKB (Pasar Ber SKB) Hasil : Meningkatnya Partisipasi Pedagang Mikro Dalam Acara Pameran	Pasar rakyat, Kabupaten Nias	1 Pasar 10 pasar	10.420.000	APBD Kabupaten Nias		1 Pasar 10 pasar	10.000.000
000.0001.02.003	Rehabilitasi Pasar Rakyat	Keluaran : Jumlah pasar yang dibangunkan/direhabilitasi pasar Hasil : Cakupan kerahan pasar yang cukup jumlah pasar pasar baik	Pasar rakyat dan Pasar Peninggi	1 unit 30 %	40.000.000.000	Urae Nias dan Niasue		1 unit 30 %	0.740.000.000

Kode	Uraian / Bidang Uraian Realisasi / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Realisasi Mjd Rencana Tahun 2014	
			Luas	TARGET Capaian Kinerja	Kebijakan dan / Regu Indikator	Sumber Dana		TARGET Capaian Kinerja	Kebijakan dan / Regu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
08030001.20.004	Manajemen Perolehan Pasar	Indikator : Jumlah Pasar Pekar Pasar Rakyat Indikator : Jumlah PDB Pasar Pasar Rakyat Indikator : Jumlah Pengantar UKM Pasar Ind. : Mengetahui jumlah pasar	Kategori Dasar	1000000	14.475.000	APBC Kabupaten	1000000	14.475.000	

Berdasarkan  
Kepala Dinas Perdagangan

I. Subiyanto Hadi, MM  
NIP. 19600119640317013



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2019. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2019. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL  
  
SUHARSONO